



## WELFARE

JURNAL ILMU EKONOMI

VOLUME 6 NOMOR 1 (MEI 2025)

<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>

ISSN 2723-2212 (MEDIA ONLINE)

ISSN 2723-2220 (MEDIA CETAK)

# ANALISIS DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN KEMISKINAN DENGAN PENGANGGURAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI SULAWESI SELATAN

Aslam Jumain<sup>a\*</sup>, Agus Tri Basuki<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Universitas Bosowa, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

<sup>b</sup>Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Yogyakarta, Indonesia

\*[aslamjumain@universitasbosowa.ac.id](mailto:aslamjumain@universitasbosowa.ac.id)

*Diterima: Maret 2025 Disetujui: April 2025 Dipublikasikan: Mei 2025*

### ABSTRACT

*Poverty in developing nations, including Indonesia, is a complex issue stemming from inequalities in access to education, healthcare, and economic resources. This study examines the connections between economic growth, the Human Development Index (HDI), and poverty, with unemployment serving as a moderating factor in South Sulawesi from 2019 to 2023, employing panel data and the Fixed Effect Model (FEM). The findings indicate that the HDI significantly reduces poverty, underscoring the importance of enhancing education, healthcare, and income for poverty alleviation. Conversely, unemployment significantly worsens poverty, yet it does not influence the relationship between economic growth and HDI in relation to poverty. Economic growth itself also does not have a direct impact, suggesting the necessity for inclusive growth policies. The study highlights the critical role of HDI and unemployment reduction in addressing poverty, offering policy recommendations focused on enhancing HDI, generating employment, and ensuring a fairer distribution of the benefits of growth.*

**Keywords:** *Economic Growth, Human Development Index, Poverty, Unemployment*

### ABSTRAK

Kemiskinan di negara berkembang termasuk Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan terkait dengan ketidakmerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Penelitian ini mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kemiskinan, dengan pengangguran sebagai variabel moderasi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2023, menggunakan data panel dan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berperan signifikan dalam mengurangi kemiskinan, hal yang perlu diperhatikan pentingnya peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Sementara itu, pengangguran berkontribusi positif terhadap peningkatan kemiskinan, namun tidak mempengaruhi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap kemiskinan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara langsung, yang menunjukkan perlunya kebijakan pertumbuhan yang lebih inklusif. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan IPM dan pengurangan pengangguran dalam upaya pengentasan

kemiskinan, dengan saran kebijakan yang fokus pada peningkatan IPM, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan manfaat pertumbuhan.

**Kata Kunci:** Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Pengangguran

## I. PENDAHULUAN

Kemiskinan di negara berkembang termasuk Indonesia merupakan permasalahan multidimensional yang mencerminkan ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan sumber daya ekonomi (Patta, 2019). Ketimpangan ini paling nyata terlihat di wilayah terpencil, di mana keterbatasan akses pendidikan menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia, meskipun pemerintah telah mengupayakan intervensi melalui program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) (Sihombing et al., 2023). Disisi lain, distribusi pelayanan kesehatan yang tidak merata serta minimnya fasilitas di daerah tertinggal masih menjadi hambatan signifikan, walaupun penerapan *Universal Health Coverage* (UHC) mulai menunjukkan dampak positif dalam menekan angka kemiskinan (Widyastuti & Mukti, 2022). Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan peluang ekonomi terutama di wilayah Timur Indonesia dapat memperkuat lingkaran kemiskinan yang sulit diputuskan sehingga menuntut penguatan pemberdayaan ekonomi berbasis pengembangan UMKM dan sektor unggulan lokal (Firnanda & Wijayanto, 2023).

Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sering kali dianggap sebagai motor utama dalam menurunkan kemiskinan. Namun, pertumbuhan tersebut tidak selalu memberikan manfaat merata bagi seluruh lapisan masyarakat karena ketimpangan pendapatan yang masih tinggi (Arifuddin et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pertumbuhan yang bersifat inklusif, agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh kelompok sosial (Hendra Andy Mulia Panjaitan et al., 2020). Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja menjadi strategi penting dalam memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nurhafizah & Mafruhat, 2021).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai indikator kualitas hidup yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup memegang peranan sentral dalam pengentasan kemiskinan. Dimensi kesehatan yang diukur melalui harapan hidup memungkinkan individu berpartisipasi lebih produktif dalam kegiatan ekonomi sehingga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan (Reavindo, 2021). Pendidikan, sebagai dimensi kedua IPM, membuka akses terhadap pekerjaan yang lebih layak dan meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan yang secara signifikan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan (Rahmawati & Hidayah, 2020). Sementara itu, peningkatan standar hidup melalui pertumbuhan pendapatan per kapita dan perluasan akses terhadap layanan dasar turut mendukung penurunan kemiskinan, meskipun distribusinya masih sering timpang (Sihombing et al., 2023). Dengan demikian, peningkatan IPM melalui investasi pada pendidikan, kesehatan, dan standar hidup merupakan strategi utama untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Susilo et al., 2025).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi menjadi faktor penghambat dalam pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi, karena dapat memperparah ketimpangan pendapatan dan memperlambat proses pengentasan kemiskinan (Aji & Destiningsih, 2022). Sebaliknya, peningkatan IPM melalui perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan dapat menurunkan TPT dengan menciptakan peluang kerja yang lebih luas, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan (Migala-Warchoł & Sobolewski, 2020). Namun demikian, TPT yang tinggi dapat memperkuat dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif yang kemudian berdampak pada memburuknya kondisi kemiskinan (Muhsa & Lydia Rosintan, 2023). Dinamika ini sangat relevan untuk dianalisis secara lebih dalam,

khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, di mana studi empiris mengenai interaksi antara pertumbuhan ekonomi, IPM, dan pengangguran masih terbatas.

Provinsi Sulawesi Selatan menjadi representasi dari kompleksitas dinamika tersebut. Disparitas regional dalam indikator pertumbuhan ekonomi, IPM, dan kemiskinan cukup mencolok. Alokasi investasi yang tidak merata menyebabkan sebagian daerah mengalami ketertinggalan pembangunan dan memperburuk kemiskinan lokal (Hania Cholily, 2024). Perbedaan tingkat IPM antarwilayah juga signifikan; wilayah dengan IPM tinggi umumnya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah karena memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan (Azwar & Subekan, 2016). Sebaliknya, wilayah dengan IPM rendah cenderung terperangkap dalam lingkaran kemiskinan struktural. Ketimpangan ini diperparah oleh distribusi pengeluaran pemerintah yang tidak efektif atau tidak merata (Aji & Destiningsih, 2022), serta pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif yang menyebabkan sebagian kelompok masyarakat tidak dapat merasakan manfaat dari pembangunan (Supartoyo et al., 2018).

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, IPM, dan pengurangan kemiskinan bersifat kompleks dan saling mempengaruhi. Pertumbuhan ekonomi sering dianggap sebagai pendorong utama pengentasan kemiskinan, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh aspek pemerataan pendapatan. Studi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan dapat memperburuk kemiskinan, terutama di daerah yang memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi (Henneh, 2023). Dalam konteks ini, IPM memiliki peran penting dalam memungkinkan individu memanfaatkan peluang ekonomi melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak (Setiawan et al., 2023). Pendidikan, sebagai komponen kunci IPM, berkontribusi besar terhadap pengurangan kemiskinan dan menunjukkan urgensi investasi di bidang pendidikan dan kesehatan guna mengoptimalkan manfaat pertumbuhan

ekonomi (Irawan, 2022). Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan peningkatan IPM menjadi syarat penting untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan. Pendekatan holistik yang menekankan pentingnya pertumbuhan inklusif dan peningkatan kualitas hidup menjadi kunci agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat (Patta, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa IPM memiliki kontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Meskipun demikian, kajian mengenai pengangguran sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara IPM dan kemiskinan masih relatif jarang ditemukan (Kolibu et al., 2016; Mukhtar et al., 2019). Selanjutnya, pengangguran berdampak signifikan terhadap kemiskinan, namun belum secara eksplisit mengeksplorasi bagaimana variabel ini memengaruhi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM dalam konteks kemiskinan (Huda et al., 2020). Bukti empiris lain menunjukkan bahwa peningkatan IPM memiliki korelasi negatif dengan tingkat kemiskinan, di mana peningkatan IPM sebesar 1% dapat menurunkan kemiskinan hingga 8,38% (Widya Widya et al., 2023). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi turut berperan dalam meningkatkan IPM serta mempercepat penurunan tingkat kemiskinan (Astari & Chotib, 2024; Evita & Primandhana, 2022). Namun demikian, pengangguran memiliki efek negatif terhadap IPM, sehingga tingginya tingkat pengangguran dapat memperburuk kondisi kemiskinan meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM (Aji & Destiningsih, 2022). Di Provinsi Sulawesi Selatan, kajian yang secara khusus membahas interaksi antara pertumbuhan ekonomi, IPM, dan pengangguran masih tergolong terbatas, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami secara komprehensif bagaimana ketiga faktor tersebut saling berinteraksi (Wintara et al., 2021).

Berdasarkan studi sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dalam literatur dengan menganalisis peran

pengangguran sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan, serta menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran di wilayah dengan kompleksitas permasalahan sosial ekonomi seperti Provinsi Sulawesi Selatan.

**II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2019–2023.

Penelitian ini menggunakan Fixed Effect Model (FEM) untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta peran variabel moderasi. Alat analisis yang digunakan untuk mengolah data panel adalah EViews 12. Model FEM dipilih karena kemampuannya menangkap perbedaan karakteristik unik antar entitas tanpa memerlukan uji asumsi klasik. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik dasar variabel seperti rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi.

Variabel yang dianalisis mencakup Pov (kemiskinan) sebagai variabel dependen, serta Grt (pertumbuhan ekonomi), HDI (indeks pembangunan manusia), dan Unemp (pengangguran) sebagai variabel independen.

Transformasi logaritma diterapkan pada variabel independen untuk memperbaiki distribusi data.

Persamaan regresi data panel yang digunakan adalah:

$$Pov_i = \alpha_0 + \beta_1 \text{Log Grt}_i + \beta_2 \text{Log HDI}_i + \beta_3 \text{Log Unemp}_i + \epsilon_{it} \dots\dots\dots(1)$$

Uji Chow dan Uji Hausman digunakan untuk memilih antara CEM, FEM, dan REM. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh parsial, sementara uji F digunakan untuk menguji pengaruh simultan. Nilai R<sup>2</sup> digunakan untuk menilai kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen.

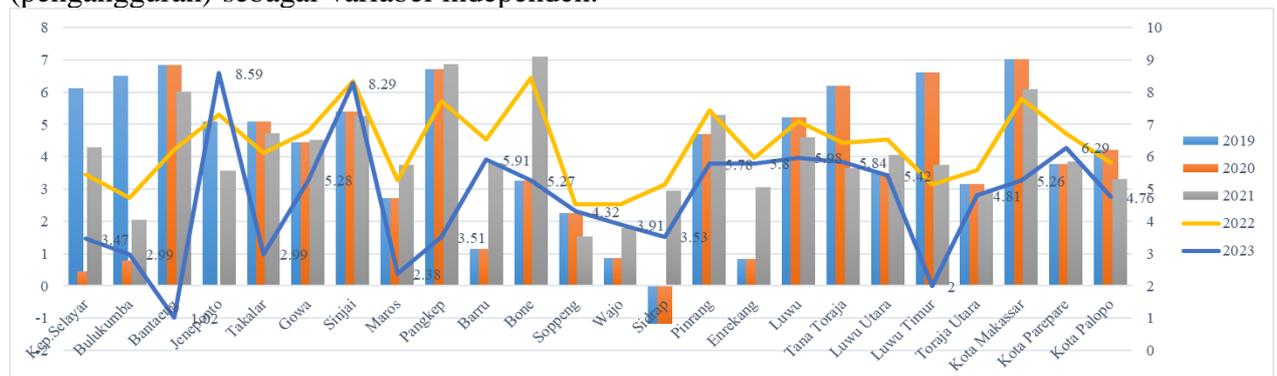
Penelitian ini juga menganalisis peran pengangguran sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap kemiskinan. Pengaruh masing-masing variabel diuji secara parsial menggunakan Uji t dan secara simultan menggunakan Uji F. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

**1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kinerja makro ekonomi daerah dalam menciptakan nilai tambah. Berikut perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2019–2023.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2023  
 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah oleh penulis (2024)

Gambar 1 menyajikan tren pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi

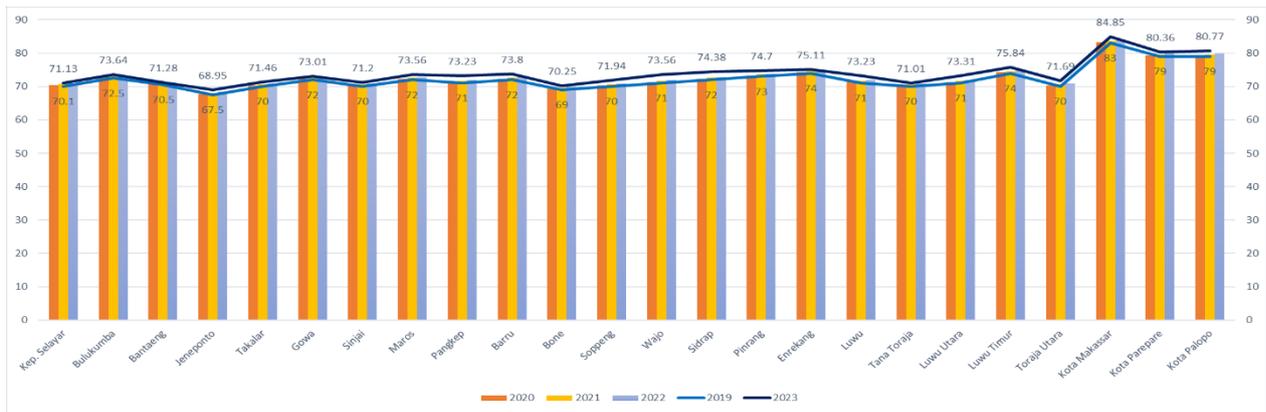
Selatan selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2023, Kabupaten Jeneponto

mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 8,59%, diikuti oleh Kabupaten Sinjai sebesar 8,29%, dan Kota Parepare sebesar 6,29%. Sebaliknya, Kabupaten Bantaeng mengalami penurunan signifikan dari 6,83% pada 2019 menjadi hanya 1,02% pada 2023. Beberapa daerah, seperti Kabupaten Takalar dan Kabupaten Maros, menunjukkan pola pertumbuhan yang relatif stagnan. Pada tahun 2019, Kota Makassar mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 7,01%, sedangkan Kabupaten Sidrap menjadi

satu-satunya daerah yang mengalami kontraksi, yaitu sebesar -1,18%.

## 2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mengukur capaian pembangunan pada aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Pada periode 2019–2023, capaian IPM di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan mengalami berbagai perubahan seiring dinamika pembangunan daerah.



Gambar 2. Perkembangan IPM di Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019–2023

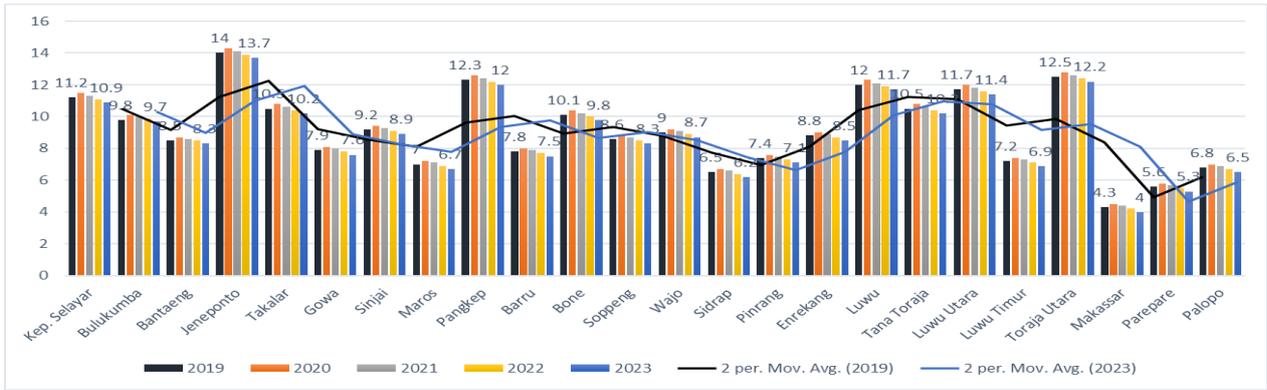
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah peneliti (2024)

Gambar 2 terlihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2019–2023. Kota Makassar secara konsisten mencatat IPM tertinggi, meningkat dari 83,00 pada 2019 menjadi 84,85 pada 2023. Disusul oleh Kota Palopo (80,77) dan Kota Parepare (80,36) pada tahun 2023, ketiga kota ini mencerminkan keunggulan wilayah perkotaan. Di sisi lain, Jeneponto mencatat IPM terendah, meskipun mengalami kenaikan dari 67,50 menjadi 68,95 selama lima tahun. Beberapa kabupaten menunjukkan peningkatan cukup signifikan, seperti Luwu Timur dari 74,00 menjadi 75,84 dan Sidenreng Rappang dari 72,00 menjadi 74,38.

Seluruh daerah mengalami tren peningkatan IPM setiap tahun, termasuk pada masa pandemi COVID-19, meskipun dengan laju yang relatif stabil.

## 3. Dinamika Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan, khususnya dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Pada periode 2019–2023, persentase penduduk miskin di sejumlah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan berbagai perubahan yang mencerminkan dinamika sosial ekonomi daerah.

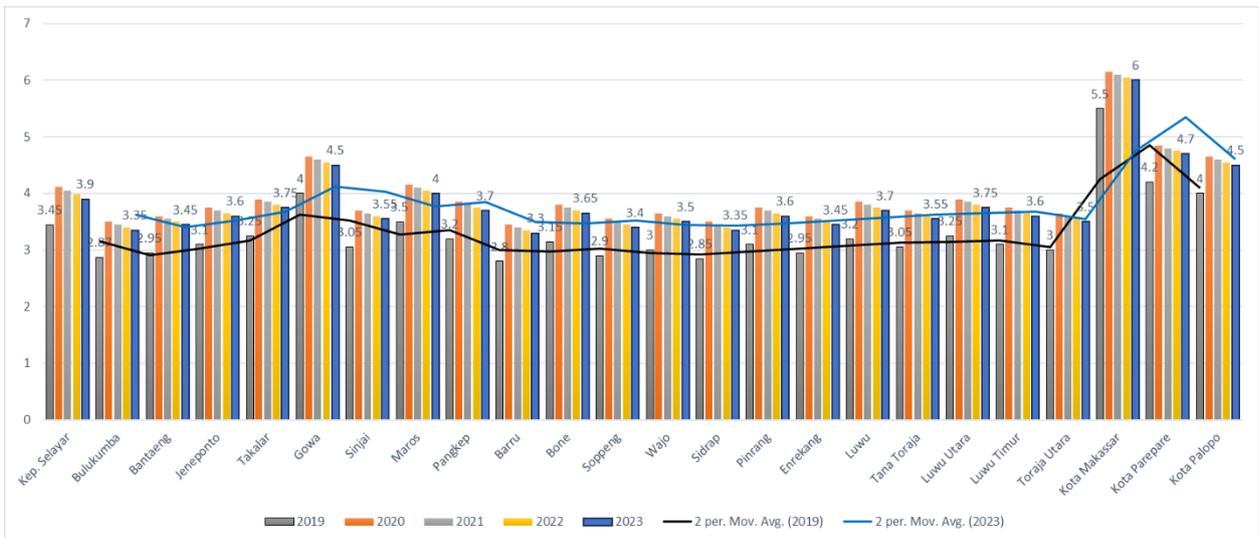


Gambar 3. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019–2023  
 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah peneliti (2024)

Gambar 3 menunjukkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren penurunan selama periode 2019–2023, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kota Makassar secara konsisten mencatat angka terendah, dari 4,30% menjadi 4,00%, diikuti Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap. Sebaliknya, Kabupaten Jeneponto tetap mencatat tingkat kemiskinan tertinggi meskipun menurun dari 14,00% menjadi 13,70%. Beberapa daerah seperti Toraja Utara dan Pangkep juga menunjukkan angka yang relatif tinggi. Penurunan kemiskinan tercatat di hampir seluruh wilayah, namun ketimpangan antar wilayah masih terlihat, terutama antara daerah perkotaan dan kawasan yang memiliki ketergantungan tinggi pada sektor primer.

#### 4. Perkembangan Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota

Pengangguran merupakan salah satu masalah sosial ekonomi yang terus menjadi perhatian di Provinsi Sulawesi Selatan. Istilah ini mengacu pada individu yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau tidak memiliki pekerjaan yang layak. Tingginya angka pengangguran dapat mengurangi produktivitas dan pendapatan masyarakat, serta menghambat pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Berikut adalah kondisi tingkat pengangguran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2019–2023:



Gambar 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019–2023  
 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah peneliti (2024)

Gambar 4 menunjukkan tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2019–2023. Kota Makassar mencatat TPT tertinggi secara konsisten, yaitu sebesar 5,50% pada 2019 dan meningkat menjadi 6,00% pada 2023. Angka ini jauh di atas rata-rata provinsi yang berada pada

mencatat TPT tertinggi secara konsisten, yaitu sebesar 5,50% pada 2019 dan meningkat menjadi 6,00% pada 2023. Angka ini jauh di atas rata-rata provinsi yang berada pada

kisaran 3,50% di awal periode dan menurun menjadi 4,00% di akhir periode. Kota Parepare dan Kota Palopo juga mencatat TPT tinggi pada 2023, masing-masing sebesar 4,70% dan 4,50%. Sebaliknya, kabupaten-kabupaten seperti Barru (3,30%), Sidenreng Rappang (3,35%), dan Bulukumba (3,35%) termasuk yang memiliki tingkat pengangguran paling rendah pada tahun 2023. Seluruh kabupaten/kota menunjukkan pola yang relatif seragam, yaitu peningkatan angka TPT pada tahun 2020 akibat dampak awal pandemi COVID-19, kemudian secara perlahan menurun hingga 2023. Kepulauan Selayar naik dari 3,45% pada 2019 menjadi 4,12% pada 2020, lalu turun bertahap menjadi 3,90% pada 2023. Tren serupa terjadi di hampir seluruh wilayah, menunjukkan adanya proses pemulihan di pasar tenaga kerja meskipun perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih tampak. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi turut diikuti oleh perbaikan akses kerja, walaupun demikian tantangan pengangguran tetap lebih besar di kota-kota utama dibanding wilayah kabupaten.

**5. Analisis Statistik Deskriptif dan Regresi Panel**

**a. Statistik Deskriptif**

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa variabel kemiskinan (Pov) memiliki rata-rata sebesar 9,13%, dengan rentang nilai antara 4,00% hingga 14,30%. Pertumbuhan ekonomi (Grt) memiliki rata-rata 1,75 dengan standar deviasi 0,41, menunjukkan variasi moderat. Indeks Pembangunan Manusia (HDI) menunjukkan nilai rata-rata 72,91, sedangkan tingkat pengangguran (Unemp) memiliki rata-rata 3,77% dan penyebaran data yang relatif kecil (standar deviasi 0,63).

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Maks	Min	Std. Deviasi
Pov	9.13	14.30	4.00	2.38
Grt	1.75	2.36	-0.20	0.41
HDI	72.91	84.85	67.50	3.53
Unemp	3.77	6.15	2.80	0.63

Sumber: Output Eviews 12, 2024

**b. Pemilihan Model Regresi Data Panel**

Uji Chow dan Hausman digunakan untuk menentukan model estimasi regresi data panel terbaik. Hasil *Chow Test* menunjukkan

probabilitas sebesar 0,0000 (<0,05) sehingga model *Fixed Effect Model* (FEM) yang terpilih. Selanjutnya, hasil *Hausman Test* menunjukkan nilai p-value sebesar 0,0139 (<0,05) sehingga kembali mengonfirmasi bahwa FEM adalah model terbaik untuk analisis regresi data panel ini.

**c. Estimasi Regresi Panel (FEM)**

Berdasarkan model FEM, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Pov = 102.5183 - 0.020392 \log Grt - 22.27072 \log HDI + 1.632640 \log Unemp + e... (2)$$

Tabel 2. Fixed Effect Model

Variabel	Koefisien	Probabilitas
Grt	-0.020392	0.4096
HDI	-22.27072	0.0000**
Unemp	1.632640	0.0000**
R <sup>2</sup>	0.999121	
p-value	0.000000**	

Catatan: \*\* menunjukkan signifikansi pada α = 5%

Sumber: Output Eviews 12, 2024

Hasil uji F menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pov (Kemiskinan). Namun, secara parsial, hanya HDI (Log(IPM)) dan Unemp (Log(Unemp)) yang signifikan, sementara Grt (Log(Grt)) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Pov (Kemiskinan).

**d. Pengujian Moderasi (MRA)**

Uji moderasi dilakukan untuk menilai apakah Unemp (Log(Unemp)) berfungsi sebagai variabel moderator dalam hubungan antara Grt (Log(Grt)) dan HDI (Log(IPM)) terhadap Pov (Tingkat Kemiskinan). Persamaan regresi moderasi ditampilkan sebagai berikut:

$$Pov = 98.60398 + 0.157653 \log Grt - 21.42030 \log HDI + 4.479746 \log Unemp - 0.146424 Grt.Unemp - 0.611056 HDI.Unemp + e... (3)$$

Tabel 3. Uji Moderasi (MRA)

Variabel	Koefisien	Probabilitas
Grt	0.157653	0.4559
HDI	-21.42030	0.0000**
Unemp	4.479746	0.0000**
Grt.Unemp	-0.146424	0.3962
HDI.Unemp	-0.611056	0.8094

Sumber: Output Eviews 12, 2024

Hasil MRA menunjukkan bahwa IPM tetap memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, dan pengangguran berpengaruh positif signifikan. Namun, interaksi antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi (Grt.Unemp) maupun dengan IPM

(*HDI.Unemp*) tidak signifikan, yang berarti bahwa pengangguran tidak berfungsi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap kemiskinan.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan

IPM memiliki kontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan karena mencerminkan kualitas hidup melalui aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Peningkatan IPM secara konsisten menunjukkan korelasi negatif dengan tingkat kemiskinan, seperti yang dibuktikan oleh (Aji & Destiningsih, 2022; Silaban et al., 2020; Tri Darmawanto, 2023) yang menegaskan bahwa IPM merupakan faktor utama dalam strategi pengentasan kemiskinan, dibandingkan dengan variabel ekonomi lainnya.

Penelitian ini memperkuat bukti bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup mampu menurunkan angka kemiskinan. Sebaliknya, pengangguran berdampak positif signifikan, artinya kenaikan tingkat pengangguran justru memperburuk kondisi kemiskinan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara langsung. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Aji & Destiningsih, 2022; Nugroho, 2016; Tirtana et al., 2025), yang menekankan pentingnya IPM dalam pengentasan kemiskinan dibandingkan variabel lain. Hal ini juga didukung oleh Prasetyoningrum (2018), yang menilai IPM sebagai komponen kunci dalam strategi pengurangan kemiskinan, meskipun relasinya dengan variabel lain cukup kompleks.

Analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa pengangguran tidak berperan sebagai moderator dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi maupun IPM terhadap kemiskinan, karena kedua interaksi variabel tidak signifikan secara statistik. Penelitian (Lunawati & Sasana, 2022; Rodliyah, 2023) menegaskan pentingnya IPM sebagai faktor utama dalam pengentasan kemiskinan, dengan investasi pada pendidikan dan kesehatan menjadi

langkah efektif untuk meningkatkan IPM dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya strategi yang berfokus pada peningkatan IPM dan pengurangan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berkualitas, serta perlunya distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata. Dengan demikian, IPM memainkan peran penting dalam strategi pembangunan manusia untuk mengurangi kemiskinan dengan kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan manusia sebagai prioritas utama. Temuan ini mendukung pentingnya pembangunan yang holistik untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan.

### 2. Pengangguran sebagai Determinan Langsung Kemiskinan

Pengangguran terbukti menjadi faktor langsung yang signifikan dalam meningkatkan kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara keduanya. Hal ini sejalan dengan temuan (Desmawan et al., 2021), yang menyatakan bahwa peningkatan tingkat pengangguran secara langsung meningkatkan jumlah penduduk miskin. Demikian pula, penelitian (Patta, 2019) mendukung argumen bahwa tingginya pengangguran memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, menurunkan pendapatan individu, dan menambah ketidakstabilan ekonomi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan positif antara pengangguran dan kemiskinan, dengan beberapa studi menyoroti dampak kuantitatif dari pengangguran terhadap kemiskinan. Penelitian oleh (Desmawan et al., 2021) menunjukkan bahwa kenaikan 1% dalam tingkat pengangguran berkorelasi dengan peningkatan 0,16% dalam tingkat kemiskinan. Variabel ekonomi, seperti UMK, turut mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah (Aji & Destiningsih, 2022), meskipun tidak menemukan pengaruh langsung dari pengangguran, temuan ini memperkuat relevansi pengangguran sebagai faktor utama yang memperburuk kemiskinan, khususnya dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Hasil analisis moderasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran tidak berfungsi sebagai moderator dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan (Evita & Primandhana, 2022; Wibowo & Setyowati, 2024), yang menyatakan bahwa meskipun pengangguran berpengaruh langsung terhadap kemiskinan, perannya sebagai moderator cenderung lemah. Studi lain oleh (Hidayah, 2024) juga menekankan bahwa faktor seperti pendidikan dan perumahan memiliki kontribusi langsung yang lebih kuat dalam menurunkan kemiskinan, bahkan ketika angka pengangguran meningkat.

Temuan ini juga mendukung argumen bahwa faktor-faktor struktural lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi, seringkali memiliki pengaruh yang tidak konsisten terhadap kemiskinan. Penelitian (Amri et al., 2022) menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, seperti kemerosotan ekonomi atau pandemi Covid-19, pengangguran menjadi faktor dominan yang memperburuk tingkat kemiskinan. Dengan demikian, meskipun pengangguran secara signifikan meningkatkan tingkat kemiskinan, pendekatan multisektoral diperlukan untuk strategi pengentasan kemiskinan yang efektif. Pendidikan, IPM, dan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif harus menjadi bagian integral dari intervensi yang dirancang untuk mengurangi dampak pengangguran terhadap kemiskinan. Kombinasi intervensi ini memberikan pendekatan yang lebih holistik untuk menangani dinamika kemiskinan yang kompleks.

### **3. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan: Hubungan Kompleks dan Peran Kebijakan Inklusif**

Meskipun pertumbuhan ekonomi sering dianggap sebagai solusi utama pengurangan kemiskinan di negara berkembang, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak signifikan secara langsung. Temuan ini sejalan menekankan bahwa ketimpangan pendapatan menghambat efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan (Evita & Primandhana, 2022). Pentingnya distribusi

pendapatan dan peran kebijakan seperti upah minimum dalam memperluas manfaat pertumbuhan bagi kelompok miskin (Rodliyah, 2023; Susilo et al., 2025).

Studi ini juga menegaskan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pengangguran memiliki dampak langsung yang memperburuk kemiskinan, tetapi tidak memoderasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap kemiskinan. Hal ini mendukung pandangan (Crespo Cuaresma et al., 2022; Ochi, 2023), yang menempatkan IPM melalui pendidikan, kesehatan, dan pendapatan sebagai komponen kunci dalam strategi pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengurangan kemiskinan lebih bergantung pada pemerataan manfaat pertumbuhan dan penguatan pembangunan manusia melalui peningkatan IPM. Tanpa kebijakan yang menitikberatkan pada keadilan distribusi dan peningkatan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi tidak efektif mengurangi kemiskinan.

## **IV. KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan pengurangan kemiskinan lebih dipengaruhi oleh peningkatan kualitas hidup melalui IPM dan penurunan pengangguran, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak berpengaruh signifikan langsung terhadap kemiskinan. Meskipun pertumbuhan ekonomi dapat membantu tetapi manfaatnya tidak merata dan pengangguran berperan langsung dalam memperburuk kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan yang fokus pada peningkatan IPM dan penciptaan lapangan kerja inklusif sangat penting untuk pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **V. SARAN/REKOMENDASI**

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa langkah strategis yang disarankan untuk mengurangi kemiskinan adalah fokus pada peningkatan IPM, penurunan pengangguran, dan penerapan kebijakan ekonomi yang inklusif. Peningkatan IPM bisa dicapai

dengan berinvestasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta memastikan akses yang adil terhadap layanan dasar. Untuk menurunkan pengangguran, perlu ada pelatihan keterampilan, peningkatan akses pekerjaan, dan dukungan untuk UMKM. Selain itu, kebijakan ekonomi harus memastikan pemerataan hasil pertumbuhan, seperti memberikan subsidi untuk kelompok rentan dan mengembangkan ekonomi pedesaan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melihat faktor tambahan seperti ketimpangan pendapatan dan akses infrastruktur serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang meningkatkan IPM dan mengurangi pengangguran di tingkat lokal.

## VI. REFERENSI

- Aji, H. K., & Destiningsih, R. (2022). Analisis Determinasi Kemiskinan 10 Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2019. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 159–167. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i2.3452>
- Amri Amir, Rafiqi Rafiqi, Ary Dean Amri, & Evalina Alissa. (2022). Determinants of human development index and Islamic human development index regency/city of Jambi Province 2016 - 2020. *International Journal of Science and Research Archive*, 5(2), 018–031. <https://doi.org/10.30574/ijrsra.2022.5.2.055>
- ARIFUDDIN, A. A., Muta'al, R., & Amir, H. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Masyarakat Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 1(1), 17–24. <https://doi.org/10.31004/ijmst.v1i1.53>
- Astari, S., & Chotib. (2024). Spatial Analysis of The Human Development Index in Indonesia Before and During The Covid-19 Pandemic. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1291(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1291/1/012002>
- Azwar, & Subekan, A. (2016). Analisis Determinan Kemiskinan Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2(1), 1–25.
- Crespo Cuaresma, J., Klasen, S., & Wacker, K. M. (2022). When Do We See Poverty Convergence?\*. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 84(6), 1283–1301. <https://doi.org/10.1111/obes.12492>
- Desmawan, D., Syaifudin, R., Mamola, R. M., Haya, H., & Indriyani, D. (2021). Determinant Factors Poverty of Relativity in Banten Province: A Panel Data Analysis. *Ecoplan*, 4(2), 131–141. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i2.387>
- Evita, M. J., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Belanja Pemerintah Terhadap kemiskinan Di Kabupaten Blora. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(S1), 79–88. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10is1.1998>
- Firnanda, A., & Wijayanto, A. W. (2023). Grouping of Regencies/Municipalities in Eastern Indonesia in 2021 Based on Socio-Economic Indicators. *Sistemasi*, 12(2), 390. <https://doi.org/10.32520/stmsi.v12i2.2499>
- Hania Cholily, V. (2024). Analisis Pola Alokasi Investasi Regional dan Faktor yang Mempengaruhinya di Indonesia Tahun 2019. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(09), 3762–3773. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1157>
- Hendra Andy Mulia Panjaitan, Sri Mulatsih, & Wiwiek Rindayati. (2020). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 43–61. <https://doi.org/10.29244/jekp.v8i1.29898>
- Henneh, O. F. (2023). Impact of Economic Growth on Poverty Reduction: Evidence

- from Ghana. *Texila International Journal of Management*, 9(2). <https://doi.org/10.21522/tijmg.2015.09.02.art007>
- Hidayah, N. (2024). Analisis Dampak Pendidikan, Perumahan Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3907>
- Huda, S. A. N., Handayani, N., & Juwita, R. (2020). Analysis of Trade, Unemployment, Government Contribution to Poverty in Three Poorest Countries in the World. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(1), 694–706. <https://doi.org/10.37200/ijpr/v24i1/pr200173>
- Irawan, E. (2022). the Effect of Unemployment, Economic Growth and Human Development Index on Poverty Levels in Sumbawa Regency in 2012-2021. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(2), 950. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i2.5455>
- Kolibu, M., Rimate, V. A., & Engka, D. S. M. (2016). Pengaruh Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2006-2015. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi*, 1–14.
- Lunawati, A., & Sasana, H. (2022). the Effect of Population, Hdi, and Grdp on the Level of Poverty in the Kedu Residency. *Marginal: Journal of Management, Accounting, General Finance and International Economic Issues*, 2(1), 68–85. <https://doi.org/10.55047/marginal.v2i1.356>
- Miła-Warchoł, A., & Sobolewski, M. (2020). the Influence of the Economic Situation on the Socio-Economic Development in the European Union Countries By Means of the Modified Hdi Index. *Technology Transfer: Innovative Solutions in Social Sciences and Humanities*, 3, 28–31. <https://doi.org/10.21303/2613-5647.2020.001296>
- Muhsa, T. T., & Lydia Rosintan. (2023). Analisis Variabel Tingkat Kemiskinan Kota/Kabupaten Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 799–814. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15594>
- Mukhtar, S., Saptono, A., & Arifin, A. S. (2019). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Ecoplan: Journal of Economics and Development Studies*, 2(2), 77–89. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v2i2.68>
- Nugroho, G. A. (2016). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 39–50. <https://doi.org/10.33105/itr.v1i1.57>
- Nurhafizah, & Mafruhat, A. Y. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Dependency Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2019. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 109–117. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i2.402>
- Ochi, A. (2023). Inequality and the impact of growth on poverty in sub-Saharan Africa: A GMM estimator in a dynamic panel threshold model. *Regional Science Policy and Practice*, 15(6), 1373–1394. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12707>
- Patta, T. (2019). the Association of Increasing Human Development Index With Reduction of Poverty in Central Sulawesi, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 95(11), 222–227. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-11.31>
- Rahmawati, F., & Hidayah, Z. M. (2020).

- Menelusur Relasi Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *EcceS: Economics Social and Development Studies*, 7(1 SE-Volume 7 Number 1, Juni 2020), 110–129. <https://doi.org/10.24252/ecc.v7i1.13919>
- Reavindo, Q. (2021). Pengaruh IPM dan Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Karo Tahun 2011-2019. *Syntax Idea*, 3(4), 903. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i4.1121>
- Rodliyah, D. (2023). The Effect of HDI, Unemployment, and Investment on GRDP and Poverty. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 6(2), 199–209. <https://doi.org/10.15294/efficient.v6i2.59000>
- Setiawan, D., Winarna, J., & Pratama Nugroho, Y. (2023). Human Development Index and Local Government Performance: Evidence from Central Java Province, Indonesia. *KnE Social Sciences*, 2023, 230–237. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i3.12830>
- Sihombing, P. R., Sinarwati, N. K. S., & Astawa, I. G. P. B. (2023). Korelasi Antar Variabel Makro Penentu Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 7(1), 29–44. <https://doi.org/10.38043/jids.v7i1.3772>
- Silaban, P. S. M. J., Br Sembiring, P. S., Br Sitepu, V. A., & Br Sembiring, J. P. (2020). the Pengaruh IPM dan PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara Tahun 2002-2017. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 311–321. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.288>
- Supartoyo, Y. H., Juanda, B., Firdaus, M., & Effendi, J. (2018). Pengaruh Sektor Keuangan Bank Perkreditan Rakyat terhadap Perekonomian Regional Wilayah Sulawesi. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1), 15–38. <https://doi.org/10.31685/kek.v2i1.207>
- Susilo, J. H., Sari, S. N., & Taufiq, M. I. M. (2025). Analisis Sosial-Ekonomi serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2023. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi; Vol 5, No 2 (2024): NovemberDO* - 10.37058/Wlfr.V5i2.10658 . <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare/article/view/10658>
- Tirtana, D., Radiwan, R., & Arief, H. (2025). Pengaruh Dependency Ratio, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Sanitasi terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi; Vol 5, No 2 (2024): NovemberDO* - 10.37058/Wlfr.V5i2.12939 . <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare/article/view/12939>
- Tri Darmawanto, A. (2023). Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan. *Syntax Idea*, 5(12), 2335–2354. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i12.2797>
- Wibowo, A., & Setyowati, E. (2024). *Analysis of the Effect of Population, Unemployment Rate, Minimum Wage, and Human Development Index on Poverty Levels in Yogyakarta DIY Province in 2017–2021*. Atlantis Press International BV. [https://doi.org/10.2991/978-94-6463-204-0\\_19](https://doi.org/10.2991/978-94-6463-204-0_19)
- Widya Widya, Elvira Anisa Fitri, Norma Setiani, Ahmad Ridha, & Asnidar Asnidar. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan IPM Terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(1), 167–186. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i1.288>
- Widyastuti, E., & Mukti, P. (2022). Peran Human Capital dalam Peningkatan Resiliensi pada Masyarakat Miskin. *Intuisi : Jurnal Psikologi Ilmiah*, 13(2), 129–142. <https://doi.org/10.15294/intuisi.v13i2.30332>
- Wintara, H., Masbar, R., & Suriani, S. (2021). Determinants of Socio Economic and Demographic Characteristics of Poverty in Aceh Province. *International Journal*

*of Business, Economics, and Social  
Development, 2(2), 50–56.*

<https://doi.org/10.46336/ijbesd.v2i2.134>